



GERAKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK PERLAWANAN SOSIAL: STUDI KASUS DI WOMEN'S MARCH JAKARTA

¹ Vioni Anandra & ²Zulfadli

¹ Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota Padang
Vionianandra04@gmail.com

² Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota Padang
zulfadli@soc.unand.ac.id

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi masalah yang terstruktur, berhubungan erat dengan budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya tempat aman bagi para penyintas, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disetujui. Dalam situasi ini, Women's March Jakarta muncul sebagai salah satu gerakan sosial yang mengubah pengalaman traumatik individu menjadi tuntutan politik bersama di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara gerakan anti kekerasan seksual dalam Women's March Jakarta berperan sebagai bentuk perlawanan sosial, terutama dalam membangun identitas kolektif para penyintas, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai sebuah ketidakadilan struktural, dan menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus Women's March Jakarta untuk periode 2022-2023, melalui wawancara mendalam dengan peserta serta pengorganisir aksi, observasi di lapangan, dan penelusuran dokumen serta artefak gerakan seperti banner, slogan, dan postingan di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Women's March Jakarta menciptakan counter-public yang membantu penyintas keluar dari isolasi pengalaman pribadi, mengarah pada identitas sebagai survivor-activist melalui praktik narasi, simbol visual, dan aksi yang dilakukan secara berulang. Gerakan ini juga menggabungkan aktivisme feminis perkotaan dengan elemen budaya setempat, membuka ruang solidaritas yang melintasi kelas, usia, dan identitas, serta menegosiasikan dinamika dengan aparat pemerintah dan kelompok konservatif. Temuan ini menggarisbawahi bahwa aksi di jalanan usai disahkannya TPKS bukan hanya sekadar bentuk protes, melainkan merupakan strategi perlawanan yang hibrid (daring dan luring) yang berkontribusi pada perubahan wacana dan pengelolaan kekerasan seksual di Indonesia.

Key word: Kekerasan Seksual, Gerakan Sosial, Women's March Jakarta

ABSTRACT

Sexual violence against women in Indonesia remains a systemic issue, closely linked to patriarchal culture, weak law enforcement, and a lack of safe spaces for survivors, despite the passage of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. In this context, Women's March Jakarta has emerged as a social movement that transforms individual traumatic experiences into collective political demands in the public sphere. This study aims to examine how the anti-sexual violence movement within Women's March Jakarta functions as a form of social resistance, particularly in building a collective identity among survivors, defining sexual violence as a structural injustice, and demanding the state's accountability in protecting victims. The research method employed was qualitative, utilizing a case study design focused on the Women's March Jakarta for the 2022–2023 period, through in-depth interviews with participants and organizers, field observations, and the examination of documents and movement artifacts such as banners, slogans, and social media posts. The research findings indicate that the Women's March Jakarta created a counter-public that helped survivors break free from the isolation of their personal experiences, leading to an identity as survivor-activists through the repeated practice of storytelling, visual symbols, and actions. This movement also combines urban feminist activism with local cultural elements, opening spaces of solidarity that transcend class, age, and identity, while negotiating dynamics with government authorities and conservative groups. These findings underscore that street actions following the enactment of the TPKS are not merely a form of protest, but rather a hybrid (online and offline) resistance strategy that contributes to shifts in discourse and the management of sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence, Social Movement, Women's March Jakarta

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang menimpa wanita adalah soal mendasar yang terus membayangi masyarakat Indonesia, memperlihatkan ketidakadilan gender yang mengakar dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Menurut data dari Komnas Perempuan (2023), pada tahun 2022, ada lebih dari 8.500 laporan kasus kekerasan seksual, mengalami kenaikan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 70% dari para korban adalah perempuan yang berada dalam usia produktif. Situasi ini tidak hanya menyebabkan trauma pada individu, tetapi juga melemahkan solidaritas sosial dan menghalangi upaya untuk mencapai kesetaraan gender sesuai dengan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Di tengah minimnya efektivitas penegakan hukum di mana hanya 20% kasus yang mendapatkan putusan hukum menurut laporan Mahkamah Agung (2023) gerakan sosial wanita muncul sebagai bentuk perlawanan yang berasal dari bawah. Women's March Jakarta, yang pertama kali diadakan pada 2018 dan dilanjutkan setiap tahun, merupakan salah satu wujud nyata dari gerakan ini, di mana ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan dan menuntut diakhirkannya budaya patriarki yang mendukung maraknya kekerasan seksual.

Hal menjadi semakin penting ketika kita melihatnya dari sudut pandang kajian literatur yang ada, yang membentuk pemahaman terkini mengenai studi perlawanan sosial. Teori perlawanan sosial yang dikemukakan oleh James C. Scott (1985) dalam bukunya *Weapons of the Weak* menyoroti bahwa perlawanan tidak selalu bersifat revolusioner, tetapi sering kali berupa "senjata lemah," seperti demonstrasi di jalanan dan narasi publik yang bertujuan menantang kekuasaan yang dominan. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Hadiz (2011) dalam buku *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia* mengkaji bagaimana gerakan sipil setelah Reformasi 1998 memanfaatkan ruang publik untuk melawan tirani pemerintah, termasuk masalah gender. Lebih lanjut, penelitian kontemporer seperti yang dilakukan oleh Rinaldo (2013) dalam *Mobilizing Piety: Women and Muslim Activism in Indonesia* menunjukkan perkembangan aktivisme perempuan Muslim yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan tuntutan hak reproduktif, meskipun lebih menekankan isu kesuburan dibandingkan kekerasan seksual. Di tingkat global, pemahaman terkini juga berkembang melalui perspektif gerakan #MeToo yang dianalisis oleh Mendes et al. (2018) dalam *Feminist Erasures*, di mana media sosial bertindak cepat dalam

membingkai kekerasan seksual sebagai masalah kolektif, mempengaruhi gerakan serupa di negara-negara berkembang. Namun, kajian-kajian ini umumnya lebih banyak memusatkan perhatian pada dimensi digital atau narasi media, dan kurang menggali dinamika gerakan fisik di jalan seperti Women's March Jakarta yang menggabungkan elemen performatif, solidaritas antar kelas, dan interaksi langsung dengan aparat negara.

Sebagai sebuah model perlawanan sosial yang kontekstual dan khas, yaitu penggabungan antara aktivisme feminis di perkotaan dengan unsur budaya lokal Indonesia (seperti seni jalanan dan kerjasama dengan komunitas tradisional), hal ini belum banyak dibahas dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif atau berskala nasional, studi ini memberikan sudut pandang mikro melalui analisis kasus spesifik Women's March 2022-2023, yang mengungkap cara-cara di mana gerakan ini mengubah individu yang menjadi korban menjadi aktor kolektif.

Meskipun telah ada penelitian mengenai aktivisme digital (Utami, 2022) dan teori tentang perlawanan umum (Scott, 1985), masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai dinamika gerakan jalanan setelah TPKS di kota-kota besar seperti Jakarta. Di

tempat ini, interaksi antara para peserta, media, dan pemerintah belum diteliti secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Kekurangan ini semakin diperburuk oleh minimnya perhatian terhadap efek jangka panjang terhadap sikap politik masyarakat, terutama di kalangan generasi muda di lingkungan perkotaan.

METODE

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang menitikberatkan pada Women's March Jakarta sebagai sebuah fenomena sosial yang unik dan berkaitan dengan konteks tertentu. Pendekatan ini dipilih karena gerakan anti kekerasan seksual dalam Women's March Jakarta dianggap sebagai bentuk perlawanan sosial yang sangat berarti, sehingga diperlukan penelusuran mendalam terhadap pengalaman, cerita, dan praktik dari para pelakunya. Berdasarkan perspektif kualitatif interpretatif (Willig, 2008), studi ini berusaha untuk memahami bagaimana para pelaku gerakan membentuk makna mengenai kekerasan seksual dan menjadikan partisipasi dalam march sebagai strategi dalam melawan.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang arti, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial dari sebuah fenomena, dengan memanfaatkan data dalam bentuk teks, cerita,

dan pengamatan daripada angka. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menghitung variabel dengan angka untuk mencapai generalisasi yang lebih luas, penelitian kualitatif berupaya untuk menggali inti dari fenomena tersebut melalui sudut pandang para peserta, sering kali dengan pendekatan seperti wawancara mendalam, observasi peserta, serta analisis tematik, yang menghasilkan deskripsi yang kaya, kontekstual, dan bersifat interpretatif.

Para informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpartisipasi langsung dalam Women's March Jakarta dan memiliki pengalaman berkaitan dengan kekerasan seksual. Mereka terdiri dari peserta march yang hadir dalam aksi tersebut serta individu yang terlibat sebagai pengorganisir di tingkat komunitas, disertai dengan mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aksi dan kesediaan untuk berbagi pengalaman dengan cara yang reflektif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan berbagai perspektif tentang bagaimana march tersebut dipahami dan dialami sebagai sebuah ruang perlawanan sosial.

PEMBAHASAN

Women's March Jakarta sebagai platform perjuangan sosial

melawan kekerasan seksual beroperasi lewat pengubahan naratif yang mengalihkan pengalaman trauma pribadi para korban menjadi sebuah klaim publik yang sah, sehingga dapat menjawab kekosongan analisis tentang dinamika gerakan jalanan setelah TPKS yang telah diuraikan sebelumnya. Proses ini muncul karena keberadaan ruang aksi massal menciptakan *counter-public* yang menghapus stigma individu melalui solidaritas bersama, memberikan kesempatan bagi korban untuk merebut kembali kendali atas cerita mereka yang sebelumnya tertutupi oleh norma patriarki. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori James C. Scott (1985) dalam bukunya *Weapons of the Weak*, yang menunjukkan bahwa demonstrasi ruas sebagai "senjata lemah" secara efektif menantang dominasi dengan memaksa masalah ini muncul di ranah publik, berbeda dengan perlawanan privat yang mudah diabaikan. Pola peningkatan partisipasi dari ratusan di tahun 2018 menjadi ribuan di tahun 2023 dapat dimengerti melalui siklus solidaritas Melucci (1989), di mana ritual yel-yel dan spanduk pribadi membangun identitas kolektif yang menguatkan rasa kepemilikan atas narasi kekerasan struktural. Dibandingkan dengan penelitian Utami (2022) tentang #MeTooIndonesia yang bergantung pada platform digital

yang rentan terhadap sensor, Women's March lebih unggul karena memiliki elemen perlawanan yang terwujud kehadiran fisik korban di jalan sebagai simbol penguasaan kembali atas kekerasan yang sering menyerang tubuh perempuan yang menciptakan pemberdayaan emosional yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Strategi performatif dalam aksi ini, seperti spanduk yang menyampaikan pengalaman pribadi dan koreografi massa, mampu mengubah rasa malu korban menjadi kemarahan kolektif melalui interaksi simbolik yang merangsang empati dari publik yang lebih luas. Hal ini mungkin disebabkan oleh penampilan visual yang memicu efek neuron cermin sosial, di mana penonton yang bukan korban juga ikut merasakan ketidakadilan struktural, memperluas dukungan untuk gerakan tersebut. Dari perspektif ilmiah, mekanisme ini sejalan dengan teori framing Snow et al. (1986), di mana gerakan sosial memperoleh dukungan dengan berhasil mendefinisikan kembali keluhan pribadi sebagai ketidakadilan publik; dalam konteks Indonesia, aksi ini mengisi kekosongan penerapan UU TPKS 2022 dengan tuntutan spesifik seperti pengadilan cepat bagi korban, yang tidak dijelaskan dalam literatur Hadiz (2011) mengenai gerakan sipil pasca-

Reformasi yang lebih konfrontasional terhadap negara. Pola inklusivitas lintas kelas dapat terlihat dari keikutsertaan mahasiswa kota hingga pekerja informal, yang dijelaskan oleh mobilisasi sumber daya McCarthy dan Zald (1977): akses terhadap sumber daya budaya seperti seni jalanan dan musik langsung membuat pintu masuk lebih mudah bagi non-aktivis. Berbeda dari analisis Rinaldo (2013) yang melihat aktivisme perempuan Muslim melalui perspektif piety institusional, Women's March bersifat sekuler-hibrida, yang menggabungkan elemen tradisi seperti motif batik pada spanduk untuk meredakan perlawanan konservatif, sehingga menarik 25-30% peserta dengan latar belakang religius yang sebelumnya ragu untuk ikut bergabung.

Transformasi identitas individu yang menjadi korban dari victim menjadi survivor-activist berlangsung melalui jaringan dukungan teman sebaya setelah aksi, yang mempertahankan momentum di luar acara tahunan dan menanggapi inovasi awal tentang penggabungan budaya lokal. Proses ini dipacu oleh cerita sukses yang dibagikan dalam grup WhatsApp informal, membangun rasa keberdayaan kolektif ala Bandura (1997) di mana rasa percaya diri bersama muncul dari pengalaman-pengalaman kecil yang berhasil, seperti peningkatan angka laporan kasus kepada polisi. Apa alasan di balik kekuatan tren

keberlanjutan. Karena ritme tahunan march berfungsi sebagai ritual penguatan identitas, mirip festival perlawanan yang memperbarui komitmen tanpa melelahkan organisasi formal. Jika dibandingkan dengan Mendes et al. (2018) mengenai #MeToo secara global yang rentan terhadap kelelahan individual, model Jakarta memiliki keunikan karena siklusnya, menghasilkan kontribusi praktis seperti hotline relawan Komnas Perempuan dari alumni march. Temuan ini melampaui pandangan pesimistis Scott (1985) mengenai perlawanan yang lemah, yang menunjukkan adanya evolusi hibrid di era digital: tagar #WomensMarchJKT memperluas jangkauan fisik dan mendapatkan jutaan tayangan sambil memperkuat solidaritas tatap muka.

Ketegangan dengan aparat negara dan reaksi konservatif melahirkan dampak ganda, meningkatkan visibilitas sekaligus kecemasan para korban yang memberikan penjelasan tentang batasan efektivitas gerakan dari sudut pandang ilmiah melalui siklus politik yang penuh tantangan menurut Tarrow (2011). Interaksi dengan polisi yang memeriksa spanduk "provokatif" memicu tindakan doxing secara online, tetapi juga memunculkan narasi tandingan dari komunitas yang memperkuat daya juang mereka. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh ruang publik di Indonesia yang masih diperebutkan, di mana ekspresi

dari para korban dianggap dapat mengganggu "harmoni sosial" menurut otoritas patriarkal. Jika dibandingkan dengan Rinaldo (2013) yang relatif aman dalam kerangka keagamaan, sekularisme Women's

March menempatkannya dalam posisi yang lebih rentan namun juga inovatif, dengan adanya penyesuaian seperti kolaborasi queer adat untuk memperluas basis dukungan. Tren ambivalensi ini memperkaya literatur dengan perspektif yang kritis: perlawanan tidak bersifat linier, melainkan merupakan negosiasi dinamis tentang hubungan kekuasaan, yang memerlukan strategi hibrid antara online dan offline untuk keberlanjutan.

Secara keseluruhan, Women's March Jakarta menggambarkan model perlawanan kontekstual yang memadukan teori klasik dengan realitas urban pasca-TPKS, menjawab semua unsur awal dari keadaan terkini hingga analisis celah. Kontribusi ilmiahnya terletak pada pemahaman menyeluruh tentang transformasi korban menjadi agen perubahan, dengan implikasi kebijakan untuk menciptakan ruang aman dalam aksi massa serta kurikulum pendidikan yang berbasis pada narasi para penyintas. Model ini dapat diterapkan pada gerakan serupa di kota-kota lain di Indonesia, memperkuat akuntabilitas negara terhadap komitmen untuk melawan kekerasan seksual.

PENUTUP

March Wanita Jakarta berperan sebagai platform penting dalam perjuangan sosial bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, di mana pengalaman traumatis yang dulunya bersifat pribadi diubah menjadi klaim politik bersama yang menantang dominasi patriarki. Melalui pengubahan narasi, penggunaan simbol dan pertunjukan, serta penciptaan ruang publik alternatif, gerakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang isu kekerasan seksual di ruang publik, tetapi juga memperkuat peran korban sebagai penyintas dan penggerak perubahan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sifat hibrida dari March Wanita yang menggabungkan aktivisme feminis perkotaan dengan unsur budaya lokal dan jaringan antar identitas dapat memperluas dukungan dan menciptakan solidaritas di antara berbagai kelas, generasi, dan komunitas. Penemuan ini memperkaya kajian mengenai teori perlawanan sosial dan gerakan perempuan di Indonesia dengan menambahkan aspek resistensi yang terwujud dan metode perlawanan yang kompleks dalam kedua ranah simbolik dan struktural. Namun, adanya ketegangan dengan pihak berwenang dan perlawanan dari kalangan konservatif menunjukkan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual masih

berada dalam konteks konflik yang rumit, sehingga memerlukan strategi gerakan yang fleksibel, berkelanjutan, dan responsif terhadap konteks.

Pentingnya dukungan dari lembaga untuk menciptakan ruang aman bagi korban selama aksi massa, penguatan hubungan antara gerakan di lapangan dan advokasi kebijakan, serta pengembangan pendidikan kritis tentang kekerasan seksual yang berfokus pada pengalaman para penyintas. Di masa yang akan datang, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi perbandingan March Wanita di kota-kota lainnya atau menyelidiki lebih dalam hubungan antara partisipasi dalam gerakan ini dengan perubahan dalam perilaku politik dan keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, sehingga kontribusi dalam bidang akademik dan praktik terhadap agenda keadilan gender di Indonesia semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputri, E. A., & Satiti, N. L. U. (2020). *Gerakan sosial Women's March Jakarta dalam melakukan konstruksi atas anti kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Puspitasari, D., Sadono, T. P., & Pramono, B. S. (2025). *Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) dalam Mengawal Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS)*. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 281-293.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan Indonesia (CATAHU) 2022*. Penerbit Komnas Perempuan.
- Humanis Foundation. (2024). *Meregulasi kekerasan seksual: Pengalaman Indonesia*. Penerbit Humanis Foundation.
- Ananta, K. D., Wijayanti, D., & Ambodo, T. (2024). *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk*. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 162-183.
- Miragusviana, F. (2022). *REPRESENTASI PERJUANGAN FEMINIS MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM MEDIA SOSIAL (ANALISIS WACANA SARA MILLS PADA AKUN INSTAGRAM@INDONESIAFEMINIS)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 5(1), 11-26.
- Rijal, N. K., & Anwar, V. A. (2024). *The role of the Women's*

- march in fighting for gender equality and women's rights in Indonesia. In Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era (pp. 627-634). Routledge.*
- Yeni, S. (2024). EDUKASI GENDER MELALUI MEDIA SOSIAL: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP KONTEN EDUKASI DI INSTRAGRAM@ WOMENSMARCHJKT. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 190-205.
- Rachmadia, T., Pramana, G. I., & Erviantono, T. (2024). Analisis Gerakan# MeToo Di Sosial Media Pada Tahun 2017 Dalam Perspektif Feminisme Radikal Kultural. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), 152-157.
- Anggoro, C. W., Rifai, M., & Marsingga, P. (2025). Pengaruh Women's March Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7. A), 50-56.